

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan penguatan pengawasan yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 yakni dalam rangka mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada lembaga pemerintah daerah. Program tersebut menargetkan untuk mencapai peningkatan kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing- masing kementerian lembaga pemerintah daerah. Peningkatan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara dan kepatuhan terhadap aturan yang mendukungnya diharapkan mampu memberikan dampak bagi peningkatan kinerja dalam pemerintahan.

Peningkatan kinerja dalam pemerintahan dapat tercermin dari hasil pengukuran kinerja. Menurut Robertson (dalam Mahsun, 2012 menjelaskan perihal pengertian pengukuran kinerja sebagai proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengertian tersebut mencakup informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa dengan memperhatikan kualitas barang dan jasa. Hasil kegiatan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan dan sasaran yang ditetapkan dengan memperhatikan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur kinerja pemerintah saat ini, didasarkan pada teori *value for Money*. Penerapan teori *Value for Money* merupakan suatu teori pengukuran kinerja sektor publik yang memiliki tiga elemen utama. Elemen tersebut yakni pertama elemen ekonomi, kedua adalah

efisiensi, dan ketiga adalah elemen Efektivitas. Penerapan teori *Value for Money* dalam pengukuran kinerja pada instansi pemerintah diyakini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya adalah pemerintah serta masyarakat. Salah satu manfaat yang diharapkan dalam penerapan elemen *Value for Money* pada penyelenggaraan pemerintahan antara lain pencapaian pengadaan yang efektif atau hemat serta cermat dan efisien atau berdaya guna dalam penggunaan sumber daya, dan berhasil guna dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Mardiasmo 2015:130).

Pencapaian kinerja efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan *Value of Money* tidak terlepas dari anggaran dan realisasi belanja pada suatu instansi pada sektor pemerintahan. Kinerja yang efektif dan efisien akan tercermin pada pelaksanaan dan penatausahaan anggaran yang baik. Semua tingkatan organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah dituntut untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien dalam pengelolaan anggaran.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu pemerintah daerah mewujudkan keseriusannya dalam peningkatan kinerja. Laporan Kinerja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mampu mewujudkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran - sasaran strategisnya. Hal ini tercermin dari hasil analisis pencapaian indikator tujuan terhadap 5 (lima) tujuan yang ditetapkan dengan menggunakan 8 (delapan) indikator kinerja. Analisis tersebut menunjukkan hasil bahwa terdapat ketercapaian pada 6 indikator tujuan dengan prosentase 75% yang dapat diinterpretasikan sebagai Sangat Berhasil. Disamping itu terdapat 2 (dua) indikator tujuan yang menunjukkan prosentase ketercapaian sebesar 25% dengan kategori Berhasil. Berdasarkan data tersebut, rata - rata realisasi capaian kinerja tujuan mencapai prosentase sebesar 105,01% yang dapat digolongkan dalam kategori Berhasil. Disamping itu, penilaian juga dilakukan terhadap

sasaran kinerja. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 9 (sembilan) sasaran yang dinilai dengan indikator kinerja sebanyak 21 (dua puluh satu), menunjukkan hasil bahwa 10 (sepuluh) indikator sasaran tercapai sebesar 47,62% dengan kategori Sangat Berhasil. Selanjutnya terdapat 9 (sembilan) indikator sasaran mencapai prosentase sebesar 42,86% yang dikelompokkan dalam kategori Berhasil, dan 2 (dua) indikator sasaran mencapai prosentase sebesar 9,52% yang dikategorikan Cukup. Dengan demikian, rata - rata realisasi capaian kinerja sasaran mencapai prosentase sebesar 105,40% dan dikelompokkan dalam kategori Sangat Berhasil. Dengan demikian, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 dapat dikategorikan sebagai SANGAT BERHASIL.

Hal tersebut tidak terlepas dari upaya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam peningkatan kinerja. Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Sidoarjo adalah Kecamatan Sidoarjo. Kecamatan Sidoarjo terdiri dari 10 desa dan 14 Kelurahan. Kelurahan Pucang merupakan salah satu Unit Kerja yang terdapat pada Kecamatan Sidoarjo.

Pemerintah Kelurahan Pucang merupakan unit organisasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Sidoarjo. Pelaksanaan anggaran pada Kelurahan dilaksanakan oleh penanggungjawab pengelola keuangan yang terdiri dari Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dijabat oleh Sekretaris Kelurahan, dan Salah satu staf yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Setiap tahunnya pelaksanaan kegiatan pada Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sidoarjo.

Pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo didanai dengan Dana APBD Kabupaten Sidoarjo dan Dana Alokasi Umum Tambahan

Kelurahan, yang terdiri dari belanja barang/jasa dan belanja modal. Penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kelurahan Pucang diupayakan untuk dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja. Setiap tahunnya besaran anggaran pada Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo mengalami peningkatan. Namun masih terdapat beberapa capaian kinerja kegiatan pada Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo yang masih menunjukkan capaian yang rendah.

Bertitik tolak pada permasalahan tersebut, penting untuk melakukan tinjauan lebih lanjut melalui penelitian tentang “Peran Realisasi Anggaran dalam Meningkatkan Kinerja pada Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo”

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo menjadi dasar dalam merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Peran Realisasi Anggaran dalam Meningkatkan Kinerja pada Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo?”

1.3. Tujuan Penelitian

Pengumpulan dan analisis data yang dilakukan pada Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo bertujuan untuk mengetahui Peran Realisasi Anggaran dalam Meningkatkan Kinerja pada Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan membawa manfaat, diantaranya adalah :

1. Aspek Akademis dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Simpulan yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi sebagai tambahan literatur bagi mahasiswa dalam menambah wawasan. Selain itu diharapkan hasil penelitian ini akan mendasari peneliti selanjutnya dalam melakukan pengembangan penelitian di bidang yang sejenis.

2. Aspek Empiris

a. Bagi Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pencapaian kinerja Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo dan sebagai masukan dalam menyusun indikator-indikator kinerja sehingga realisasi capaian kinerja dapat tercapai dengan maksimal.

b. Bagi Instansi Pemerintah Lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi Instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).